

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah panjang perpolitikan bangsa Indonesia telah banyak melahirkan cerita-cerita baru demi terciptanya sebuah negara yang bisa bersaing di dalam peradaban dunia. Setidaknya ada beberapa fase sejarah bangsa Indonesia yang telah mencoba membuat peradaban bangsa Indonesia ke arah negara yang lebih baik dan mapan yaitu era Orde Lama, Orde Baru dan reformasi. Tentu ketiga era ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang mungkin tidak bisa masyarakat Indonesia ungkapkan lewat kata-kata.

Dari ketiga fase yang ada di atas setidaknya ada dua fase yaitu Orde Lama dan Orde Baru yang mungkin sampai saat ini masih tidak bisa diterima oleh umat Islam dalam sejarah perpolitikan bangsa Indonesia semenjak paska kemerdekaan dan sampai jatuhnya rezim Orde Baru. Bagaimana tidak, di sepanjang rezim Orde Lama dan Orde Baru adalah masa sulit bagi umat Islam dan politik Islam dalam memperjuangkan cita-cita mereka untuk bisa memiliki negara yang diimpikan bersama-sama yang sesuai dengan syariat Islam.

Fase Orde Lama adalah bagaimana pertarungan politik dalam mengisi dasar negara Indonesia paska kemerdekaan telah meninggalkan sejarah panjang bagi umat Islam yang mungkin samapai saat ini sangat sulit untuk diterima dengan ikhlas. Begitupun juga di fase Orde Baru adalah bagaimana kesulitan-kesulitan bagi umat

Islam untuk bisa bertahan di bawah tekanan rezim yang sangat otoriter dan memiliki kekuasaan di semua lini antara lain yaitu militer dan birokrasi.

Ketika jatuhnya rezim Orde Baru Indonesia memiliki fase yang namanya reformasi (peralihan kekuasaan yang bersifat otoriter ke arah yang lebih demokratis). Pergantian rezim dari Orde Baru ke reformasi telah terciptanya harapan baru oleh rakyat Indonesia yang selama ini telah mengharapkan sebuah negara yang bisa mensejahterahkan nasib mereka dan peduli dengan penderitaan mereka. Namun hal itu hanyalah ilusi semata. Sebab, nyatanya dari ketiga fase tersebut masih saja rakyat menjerit setiap hari dan waktu.

Mungkin sebagai warga negara di Indonesia bukanlah tempat pilihan yang baik untuk bisa hidup dengan layak. Sebab, sangat susah sekali untuk kita bisa merasakan bagaimana seharusnya negara mensejahterahkan rakyatnya, menjaga keamanannya, menjaga harta bendanya dan menjaga harkat martabat bangsa dan rakyatnya. Tapi setidaknya sebagai manusia, Indonesia tempat pilihan yang baik untuk hidup dari negara manapun bagi penulis. Sebagai manusia kita bisa hidup seperti manusia yang bebas, tanpa aturan yang kuat, bertahan hidup meski negara tak mau peduli dan itu semua masih tidak menjadi masalah bagi seorang manusia Indonesia dan mereka masih bisa tetap hidup tanpa harus mengeluh kepada negara.

Namun di tengah kegelapan sebuah negara Indonesia ada momentum yang baik bagi umat Islam setelah melewati dua fase yang sangat menyulitkan bagi mereka yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Hadirnya reformasi merupakan sebuah momentum

bagi umat Islam untuk bisa berjuang dalam menentukan arah bangsa ini setelah dua fase mereka merasakan kesulitan yang sangat luar biasa. Munculnya era reformasi membuat umat Islam memiliki ruang yang cukup lebar di dalam percaturan politik Indonesia. Seperti kita ketahui hadirnya politik Islam yang begitu membanjiri pentas politik paska reformasi merupakan suatu pertanda cita-cita politik umat Islam masih ada setidaknya dalam mewujudkan negara berdasarkan syariat Islam.

Semenjak dihapuskannya anggota istimewa di dalam Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) sebagai representasi partai Islam paska reformasi dan semenjak itu juga organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam kembali kepada konsentrasi perjuangannya yaitu berjuang di dalam bidang keagamaan dan pendidikan. Namun yang menarik disini adalah meskipun persatuan Islam atau yang disingkat dengan panggilan Persis tidak menemukan keberhasilan di dalam Masyumi untuk mencapai terciptanya negara yang berdasarkan syariat Islam, namun semangat untuk menciptakan negara yang berdasarkan syariat Islam sampai sekarang tidak pernah pudar. Meskipun Persis tidak lagi menjadi anggota istimewa partai politik apapun untuk saat ini.

Semenjak Persis tidak lagi bersama dengan Masyumi adalah masa-masa sulit bagi Persis dan khususnya umat Islam dalam mewujudkan cita-cita politiknya. Sebab tak lama Persis keluar dari Masyumi langsung disambut dengan rezim yang sangat otoriter yaitu rezim Orde Baru yang memainkan peran yang sangat dominan dalam menyingkirkan semua lawan politik yang mengancam dan yang bagi mereka

mengganggu stabilitas politik dan pembangunan pada saat itu. Setelah bergantinya rezim dari Orde Baru ke reformasi, setidaknya harapan-harapan besar dari politik umat Islam semakin terasa kembali. Seperti kita ketahui setelah jatuhnya rezim Orde Lama mantan tokoh-tokoh Masyumi berusaha kembali untuk merehabilitasi partai Masyumi.

Namun usaha dalam merehabilitasi Masyumi tidaklah semuda yang dibayangkan oleh para mantan tokoh Masyumi tersebut. Karena rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto sangat hati-hati dalam lawan politik yang akan mengancam posisinya sebagai penguasa. Ketakutan Orde Baru jikalau Masyumi bisa hadir lagi adalah adanya kecenderungan dari partai Masyumi untuk mendirikan negara berdasarkan syariat Islam. Berkaca dari rezim sebelumnya Orde Lama yang banyak bermunculan kekuatan-kekuatan politik dominan yaitu Presiden Soekarno dengan Partai Nasionalisnya, kekuatan Militer, Islam dan Komunis. Telah memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi pemerintahan Orde Baru.

Karena banyaknya kekuatan politik yang saling mendominasi pada demokrasi terpimpin tersebut maka untuk menciptakan kestabilan politik sangatlah sukar. Karena yang terjadi adalah pertarungan antar sesama yang menggunakan identitas ideologi. Sehingga dengan kuatnya pertarungan politik yang terjadi pada waktu itu, sehingga kurangnya perhatian pemerintah terhadap rakyat dan kesejahteraan ekonominya maupun negara. sehingga pembangunan sangat susah bisa tercapai dengan baik dan cepat.

Belajar dari rezim sebelumnya itulah kekuasaan Orde Baru di bangun berdasarkan kekuasaan tunggal yaitu Militer. Sehingga rezim Orde Baru memainkan strategi politik yang kekuasaan seutuhnya berada dalam genggamannya negara. Untuk mengantisipasi serangan dari kelompok oposisi rezim Orde baru mencoba memainkan strategi menyingkirkan lawan-lawan politiknya dengan menggunakan operasi khusus yang diciptakan oleh Soeharto dengan orang kepercayaan Ali Moertopo.

Dengan operasi khusus inilah rezim Orde Baru menyingkirkan semua lawan politiknya, seperti penghancuran gerakan komunis di Indonesia dan intervensi serta mengobrok-abrik politik Islam yang sebelumnya telah difusikan kepada PPP. Dengan kuatnya tekanan dari rezim yang berlangsung pada saat itu membuat Persis kewalahan jika harus memainkan peran di dalam politik. Kemudian ditambah lagi dengan adanya perbedaan pendapat antara Persis terkait dengan hasil rehabilitasi Masyumi dengan kemunculan Partai Muslim Indonesia (Parmusi) terkait perjuangannya masalah kepemimpinan yang dipilih tidak berdasarkan pilihan umat. Sehingga dengan adanya perbedaan pemikiran dan pendapat ini membuat Persis untuk tidak terlibat dalam keanggotaan Parmusi.

Perbedaan pendapat dan semakin tertutupnya peluang politik Persis di bawah rezim Orde Baru. Sehingga telah membuat Persis untuk kembali ke dasar perjuangan awalnya semenjak berdiri yaitu pemikiran keagamaan dan pendidikan. Sebab, bagi Persis sendiri hal yang mungkin bisa dilakukannya di zaman Orde Baru hanyalah

melakukan pengembangan dakwah dan pendidikan. Karena sesuatu yang sangat sulit untuk Persis kembali lagi di ruang politik yang sarat akan intervensi para penguasa dan ditambah lagi berlakunya azas tunggal bagi semua organisasi.

Dengan berlakunya azas tunggal ini Persis mencoba mengatasinya dengan melakukan konsolidasi terhadap internalnya dan penguatan terhadap internal Persis atau yang disebut dengan politik isolasi. Yang diharapkan dari politik isolasi, penguatan internal dan konsolidasi secara menyeluruh kesetiap bagian dari Persis ini tak lain agar bisa dapat bertahan di bawah tekanan rezim Orde Baru dan terhindar dari penyusup dari luar yang mungkin itu orang suruhan Soeharto dengan operasi khususnya. Bagi penulis sendiri, bisa bertahan saja di bawah tekanan Orde Baru bagi semua organisasi dan lawan politik Soeharto adalah suatu hal yang sangat baik dan luar biasa. Karena tidak mudah untuk bertahan di bawah pemimpin yang otoriter dan memiliki tangan besi yang menggunakan segala cara untuk menyingkirkan semua lawan politiknya yang mengancam.

Setelah dalam masa-masa kesulitannya lawan-lawan politik Soeharto dan terkhusus umat Islam. Ada sebuah harapan baru untuk keterlibatan umat Islam dalam ruang politik yaitu setelah jatuhnya rezim yang sudah berkuasa puluhan tahun lamanya yang diganti dengan era baru. Era yang dicapai dengan susah payah dan nama era ini sangat melekat dengan apa yang sering diteriakkan oleh semua masyarakat, mahasiswa, buruh dan para kaum Cendekiawan disaat penurunan rezim Soeharto yaitu reformasi.

Hadirnya reformasi merupakan awal bagi partai yang menggunakan identitas Islam bermunculan dengan bebas. Kebanyakan partai yang menggunakan identitas Islam paska reformasi adalah berawal dari organisasi keagamaan maupun dari perkumpulan-perkumpulan (Masjid dan Kampus) yang memiliki identitas keagamaan. Seperti partai yang memiliki kedekatan kader dengan organisasi sosial dan keagamaan yaitu Muhammadiyah dengan hadirnya Partai Amanat Nasional (PAN) di bawah pimpinan Amien Rais dan Nahdlatul Ulama (NU) dengan Partai Keadilan Bangsa (PKB) di bawah pimpinan Gus Dur.

Keterlibatan organisasi sosial dan keagamaan paska reformasi dalam ruang politik bukanlah sebagai hal yang pertama kali di dalam perjalanan bangsa Indonesia. Melainkan sudah semenjak di dalam Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) sebagai representasi partai politik umat Islam satu-satunya paska kemerdekaan Indonesia. Setidaknya organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam dan NU sudah lama bersinggungan dengan politik.

Sebab di dalam sejarah gelombang perpolitikan Indonesia mungkin bisa kita rasakan ketika organisasi ini menjadi anggota istimewa di dalam Masyumi. Namun yang membedakan di era reformasi ini adalah tidak ada hubungan yang istimewa antara partai PAN dengan Muhammadiyah dan maupun NU dengan PKB. Hubungan yang mereka rasakan melainkan adalah kedekatan kader organisasi tersebut yang ikut berkiprah kedalam politik praktis paska reformasi dengan mendirikan partai politik.

Dan sangat sulit jika kita mengatakan suara Muhammadiyah pasti ke PAN dan NU ke PKB.

Karena paska reformasi merupakan awal terbukanya kran¹ untuk mendirikan partai politik dengan begitu bebas setelah di era Orde Baru terjadinya fusi bagi seluruh partai yang hidup di era Orde Lama. Dengan banyaknya berdiri partai politik Islam dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga membuat suara umat Islam terpecah dengan banyaknya pilihan terhadap partai politik Islam seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan) PBB (Parti Bulan Bintang), PK (Partai Keadilan)-PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PAN, PKB, dan lain-lain.

Namun di tengah marak berdirinya partai politik Islam yang hadir diwarnai oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan seperti yang telah disampaikan di atas. Ada suatu hal yang sangat menarik yaitu tidak terdengarnya organisasi keagamaan seperti Persatuan Islam (PERSIS) dalam percaturan politik paska reformasi. Padahal Persatuan Islam sendiri adalah sebuah organisasi keagamaan yang dahulunya sempat berjuang di bawah bendera Masyumi dengan Muhammadiyah dan NU. Tentu bisa dikatakan politik bukanlah sesuatu hal yang baru lagi buat Persatuan Islam.

Kemudian dengan terbukanya kran untuk mendirikan partai politik tidak membuat tokoh-tokoh dari Persatuan Islam atau disingkat dengan PERSIS tergoda untuk mendirikan partai politik seperti tokoh-tokoh yang ada di Muhammadiyah dan NU. Padahal sejarah telah mencatat bagaimana kader-kader Persis seperti Mohammad

¹Kran Di Atas Sebagai Penanda Terbukannya Ruang Untuk Berdirinya Partai Politik.

Natsir dan K.H. Mohammad Isa Anshary sempat mewarnai panggung politik Indonesia di bawah bendera Masyumi dahulunya.

Oleh sebab itu melihat fenomena yang terjadi paska reformasi di dalam perjuangan politik umat Islam dan terutama Persis. Merupakan hal yang sangat menarik bagi penulis yang ingin penulis teliti, yaitu bagaimana cara Persis merespon arus perpolitikan paska reformasi? Ditambah lagi cita-cita Persis dalam memperjuangkan negara berdasarkan syariat Islam dalam sebuah negara tanpa memiliki kendaraan politik? Jika dahulu Persis memiliki kendaraan politik yaitu Masyumi dalam memperjuang negara berdasarkan syariat Islam di dalam sebuah negara, namun paska reformasi bagaimana upaya itu diwujudkan dengan tidak memiliki kendaraan politik atau partai politik?

Kemudian penulis juga ingin memahami kemanakah Persis menitipkan perjuangan politiknya atau afiliasi politiknya paska reformasi? karena tidak menutup kemungkinan Persis sebagai organisasi besar dan memiliki anggota yang sangat besar di berbagai belahan daerah Indonesia menjadi tempat perebutan suara dari partai politik dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu) berlangsung baik Legislatif maupun Esekutif. Untuk itu dari kegelisahan inilah penulis ingin meneliti lebih lanjut dari temuan yang penulis pahami sendiri mengenai perjuangan Persis di dalam arena politik bangsa Indonesia.

Hal yang mempengaruhi penulis ingin melakukan penelitian terhadap Persis ini adalah yang *pertama*, belum adanya penulis temukan penelitian skripsi dan tesis

terkait afiliasi politik Persis paska reformasi di kampus besar yang ada di Yogyakarta seperti UIN Sunan Kalijaga dan UGM. *kedua*, susahnya ditemukan buku dan sumber penelitian bagaimana hubungan politik Persis dengan partai politik paska reformasi, *ketiga*, jarangny penulis temui buku-buku yang membahas Persis dengan politik, jikapun ada hanyalah bersifat instrumental, seperti sekilas hubungan Persis dengan Masyumi. Maka dari itu penulis ingin melihat bagaimana perjuangan dan afiliasi politik Persis paska reformasi.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana dinamika afiliasi politik Persatuan Islam paska reformasi?
- 2) Apakah persatuan Islam masih memiliki cita-cita negara berdasarkan syariat Islam?
- 3) Apakah ideologi partai politik yang dijadikan afiliasi politik Persis dalam memperjuangkan sebuah negara berdasarkan syariat Islam?
- 4) Siapa saja partai politik yang di dukung Persis paska reformasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

- A. Untuk mengetahui bagaimana dinamika afiliasi politik Persatuan Islam paska reformasi?
- B. Untuk mengetahui apakah persatuan Islam masih memiliki cita-cita negara berdasarkan syariat Islam?

- C. Untuk mengetahui apakah ideologi partai politik yang dijadikan afiliasi politik Persis dalam memperjuangkan sebuah negara berdasarkan syariat Islam?
- D. Untuk mengetahui partai politik apa saja yang di dukung Persis paska reformasi?

D. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi kajian gerakan Islam atau Organisasi keagamaan di Indonesia terutama hubungannya dengan politik paska era reformasi dan partai-partai yang mencari suara di dalam organisasi non partai seperti Persis. Disisi lain, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran fenomena Persis sebagai organisasi keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan yang ingin memperjuangkan syariat Islam dalam sebuah negara tanpa memiliki wadah politik.

E. Kerangka Teori

Kerangka atau dasar teori yang digunakan dalam melihat bagaimana afiliasi politik persatuan Islam paska reformasi adalah teori-teori yang digunakan seperti teori aktivisme Islam, domestikasi, korporatisme, dan teori transisi demokrasi yang sekiranya bisa membantu menjelaskan mengenai afiliasi politik persatuan Islam paska reformasi.

1. Domestikasi

Penggunaan teori domestikasi lebih cenderung sebagai alat penguat untuk memahami dua rezim yang telah berlalu yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Teori ini seringkali diasosiasikan dengan karya-karya Harry J. Benda mengenai Islam di Indonesia.²

Dengan mengingat kejadian yang terjadi kepada kekuatan partai politik Islam dan umat Islam maka dalam perebutan kekuasaan tersebut bukanlah hal yang sangat sederhana maupun sangat mudah untuk dilakukan oleh para tokoh bangsa ini. Tak jarang membutuhkan strategi yang unik dan juga bisa dikatakan menggunakan strategi yang menjadikan salah satu korban menjadi tumbal dari kepentingan politik mereka.

Apabila kita mengingat kembali paska-kemerdekaan bangsa Indonesia maka apa yang dilakukan oleh kelompok Nasionalis yang dipimpin oleh Soekarno adalah bagaimana mengupayakan menjinakkan kekuatan-kekuatan lawan politiknya. Dan tentu lawan politik kelompok Nasionalis yang sangat kuat untuk mengancam pada saat itu adalah dari kalangan kelompok politik yang menggunakan Islam sebagai identitas perjuangan mereka atau partai politik Islam. Karena apa yang dilakukan oleh Soekarno pada saat itu adalah bagaimana membangun kekuatan politik dengan kelompok komunis dan inilah cikal bakal banyaknya dari kalangan tokoh politik Islam mulai tersingkirkan.

²Lihat Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara Transformasi Gagasan Dan Pratik Politik Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Democracy Project, Yayasan Abad Demokrasi, 2011),hal : 31.

Dan begitu juga dengan disambutnya zaman Orde Lama maka hal yang dialami oleh umat Islam dan politik Islam tidaklah jauh berbeda dengan rezim Orde Lama. Setidaknya di bawah era Orde Lama umat Islam dan politik Islam mengalami tekanan yang kuat bagi sistem yang otoriter. Kemudian tak jarang rezim Orde Baru dalam melanggengkan kekuasaannya dengan mengintervensi organisasi-organisasi Islam maupun partai Islam dan puncaknya adalah dilakukannya fusi bagi partai politik Islam dan azas pancasila bagi semua organisasi maupun partai politik. Dalam konteks pemandulan cengkraman politik Islam inilah kita dapat menemukan esensi dari teori domestikasi Harry J. Benda.³

2. Korporatisme

Untuk memahami dari teori korporatisme ini secara sederhana penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem dari korporatisme ini adalah bagaimana mengupayakan kekuasaan di dalam sebuah negara itu bersifat sentralistik kepada negara sepenuhnya.

Oleh sebab itu pemerintahan yang dijalankan haruslah memiliki kekuatan yang terpusat dari kelompok-kelompok oposisi yang mungkin akan mengancam kekuatan pemerintah yang sedang berlangsung. Karena bagi penguasa yang menjalankan roda pemerintahan yang sedang berlangsung beranggapan, bahwasanya pemerintah atau negara bukan hanya bersifat menjalankan tuntutan-tuntutan rakyat dan kelompok kepentingan saja. Tapi melainkan

³Bahtiar Effendy, *Ibid*, hal:33.

negara juga memiliki tujuan-tujuan yang harus dicapainya dalam membangun sebuah pemerintahan yang kuat di dalam era modernisasi yang disertai dengan maraknya dunia industri.

Maka untuk mencapai tujuannya tersebut negara melancarkan sitem pembangunan ekonomi dengan secara cepat dan *efisien* dalam membangun sebuah negara. Dengan berkembangnya pembangunan ekonomi maka berkembang juga kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan dari masyarakat maupun kelompok yang berada di luar negara tersebut, seperti buruh, petani dan kelas menengah ke bawah.

Dalam mengatasi dorongan dan ancaman dari kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan dari masyarakat maupun kelompok yang berada di luar negara yang begitu banyak dan kuat. Maka pemerintah memainkan yang namanya sistem korporatisme yaitu:⁴ suatu sistem perwakilan kepentingan di mana unit-unit yang membentuknya diatur dalam organisasi-organisasi yang jumlahnya terbatas dan bersifat tunggal, mewajibkan (keaggotaan), tidak saling bersaing, diatur secara hirarkis dan dibedakan secara fungsional dan diakui atau diberi izin (jika tidak diciptakan) oleh negara dan diberi hak monopoli untuk mewakili kepentingan dalam bidang masing-masing sebagai imbalan atas kesediaan mematuhi pengendalian-pengendalian tertentu dalam pemilihan pimpinan mereka dan dalam artikulasi tuntutan dan dukungan mereka, dengan

⁴Lihat Mohtar Mas'ood, *Ekonomi Dan Struktur Politik: Orde Lama 1966-1971*, (Jakarta, LP3ES, 1989), hal.13.

tujuan menindas konflik kelas dan kelompok kepentingan serta menciptakan keselarasan, kesetiakawanan dan kerjasama dalam hubungan antar negara dan masyarakat.

Sementara O'donel⁵ memiliki gagasan tersendiri terkait dengan korporatisme-negara. yaitu *bifrontal* dan *segmenter*. *Bifrontal* memiliki dua proses yaitu *statisasi* dan *privatisasi: statisasi*, dimana negara menundukan dan menguasai organisasi-organisasi sipil dan *privatisasi*, dimana negara membuka beberapa lembaga bagi tercapainya kepentingan masyarakat sipil dengan secara terorganisasi.

Sedangkan *segmenter* terbagi dua juga yaitu: *pertama*, negara memusatkan proses *statisasi* pada organisasi kelas bawah (seperti serikat buruh) dan yang *kedua*, mem-*privatisasi*-kan lembaganya hanya kepentingan kelas atas yang dominan.

Pada dasarnya membangun sistem korporatisme dalam sebuah negara adalah suatu bentuk legitimasi atau dukungan kepada para kelompok kapitalisme dalam membangun suatu tatanan politik yang mendukung pembangunan ekonomi di dalam negara tersebut.

3. Transisi Demokrasi

⁵Mohtar Mas'ood, *Ibid, hal, 14-15.*

Dalam memahami transisi demokrasi setidaknya ada tiga bentuk yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington yaitu: *transformation*, *replacement*, dan *transplacement*. Dalam *transformation* ini kelompok yang berkuasa dalam rezim otoriter mempelopori dan memainkan peran yang sangat menentukan dalam mengakhiri rezim tersebut dan mengubahnya menjadi sistem yang demokratis. Proses *replacements* sangat berbeda dengan proses *transformation*. Kelompok pembaharu masih lemah atau tidak ada dalam rezim itu. Unsur yang dominan dalam pemerintahan adalah kelompok konservatif yang dengan gigih menentang perubahan rezim. Akibatnya, demokratisasi baru bisa terwujud apabila kelompok oposisi makin kuat dan pemerintah semakin lemah sehingga jatuh dengan sendirinya atau terguling.⁶

Pada *transplacement*, demokratisasi merupakan hasil aksi bersama pemerintah dan kelompok oposisi. Di dalam pemerintah terdapat keseimbangan antara kelompok konservatif dengan kelompok pembaharu yang sedemikian rupa sehingga pemerintah bersedia merundingkan tetapi tidak bersedia memprakarsai perubahan rezim. Di pihak oposisi, kelompok moderat yang demokratis cukup kuat untuk mengendalikan kelompok radikal yang antidemokrasi, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menggulingkan pemerintah.⁷ Kemudian dari *transformation* dan *transplacement* kebanyakan dari pemimpin rezim yang otoriter memiliki kebiasaan yang meninggalkan

⁶Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta, Grafiti, 2001), hal. 158-180.

⁷*Ibid*, hal. 191.

panggung politik dan menjalani hidup yang tidak lagi bersinggungan dengan ruang politik.

Pemilu sebagai alat serta tujuan demokrasi menjadi cara untuk memperlemah dan mengakhiri rezim otoriter. Demokratisasi diwujudkan oleh para penguasa otoriter yang—karena suatu alasan—berupaya menyelenggarakan Pemilu, dan oleh kelompok-kelompok oposisi yang mendesak penyelenggaraan Pemilu dan berpartisipasi di dalamnya.⁸

Pada masyarakat transisi, Pemilu merupakan suatu konsensus bersama untuk menjawab persoalan sumber kekuasaan, tujuan kekuasaan dan prosedur yang melegalisasi kekuasaan itu sendiri. Dalam konteks ini, Pemilu memiliki tiga nilai utama: *Pertama*, Pemilu sebagai tanda berakhirnya rezim nondemokratik. *Kedua*, Pemilu memiliki makna pelantikan pemerintahan baru atau rezim demokratik yang menggantikan pemerintahan otoriter yang telah tumbang. *Ketiga*, dalam era transisi, Pemilu merupakan perwujudan dari konsolidasi sistem demokrasi yaitu suatu usaha untuk menjaga secara ketat kembalinya rezim *status quo* untuk menduduki kursi kekuasaan.⁹

4. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politikus atau pegawai

⁸*Ibid*, hal. 223.

⁹Sahdan, Gregorius, 2004, *Jalan Transisi Demokrasi Paska Soeharto*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, hal. 379.

negeri. Sifat partisipasi politik adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.¹⁰

5. Aktivisme Islam

Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan aktivisme Islam tidaklah jauh berbeda dengan gerakan-gerakan sosial yang ada di seluruh negara belahan dunia manapun. Di dalam karya mereka *social Movment* David Meyer dan Sidney Tarrow¹¹ mendefenisikan gerakan sosial yakni suatu tantangan-tantangan bersama, yang didasarkan atas tujuan solidaritas bersama dan interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, saingan atau musuh, dan pemegang otoritas.

Hadirnya aktivisme Islam sebagai kasanah ilmu pengetahuan untuk sekarang ini merupakan komparasi teori-teori gerakan sosial yang ada di negara-negara non-Muslim dan ditransformasikan kepada perkembangan gerakan sosial yang ada di negara Muslim dengan cara memperhatikan interaksi sosial dan empirisme di dunia Islam serta juga sering menggunakan pendekatan teori-teori gerakan sosial yang ada di negara non-Muslim.

Maka secara sederhana kita dapat menyimpulkan antara gerakan sosial dan aktivisme Islam adalah seperti pepatah yang mengatakan *bagaikan pinang dibelah dua*. Yang membedakan antara aktivisme Islam dan gerakan sosial di

¹⁰Lihat Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta, Indie Book Corner, 2011), Hal, 101.

¹¹Lihat Quintan Wiktorowicz, *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan Dan Studi Kasus*, (Yogyakarta, Penerbit Gading Publishing dan Paramadina, 2012), hal: 11.

Judul Asli Buku Ini Adalah *Islamic Activism: A Social Movment Theory Approach* Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press dan Diterjemahkan Oleh Tim Penerjemah Paramadina.

dunia non-Muslim adalah terletak dalam hal pembingkaiannya (ideologi), strategi dan wacana-wacana yang dikembangkannya.

Aktivisme Islam yaitu merupakan mobilisasi persetujuan untuk mendukung kepentingan dan tujuan Islam.¹² Munculnya aktivisme Islam di Negara-negara Muslim tidak terlepas dari pengaruh dua serangan yaitu *internal* dan *eksternal*. serangan *internal* yaitu dari dalam negara itu sendiri seperti pemerintah yang korup, otoriter, dan represi dan sedangkan serangan *eksternal* adalah disebabkan oleh pengaruh sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan politik yang dipengaruhi oleh negara non-Muslim (Barat) terhadap negara Muslim.

Melalui serangan dan dua tekan yang ada di atas telah menyebabkan aktivis-aktivis di negara Muslim untuk meresponnya yang diawali dengan menggunakan tiga kerangka yaitu:

1) *persetujuan dan kekerasan*, ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh modernisasi oleh negara Muslim (Timur Tengah) yang berkiblat ke negara-negara non-Muslim seperti maraknya kehidupan *westernisasi*, gaya berpakaian, *sekularisasi* dan bahasa-bahasa Barat.

2) *aliansi dan mobilisasi*, melihat maraknya pengaruh barat di negara muslim membuat aktivis-aktivis Islam untuk merespon itu semua dengan membangun sumber daya, kekuatan dan jejaringan yang solidaritas yang kuat seperti masjid, kelompok-kelompok studi, mahasiswa, khotbah di masjid, dan

¹²Quintan Wiktorowicz, *Ibid*, hal:36

lain-lain. Yang akan dijadikan sebagai alat untuk memobilisasi kesatuan kolektive dalam rangka merespon pengaruh-pengaruh tersebut, baik dari *internal* maupun *eksternal*.

3) *framing*, dengan kata lain yang dilakukan seperti penekanan pada proses pembangunan wacana dan paket-paket ideasional yang dihasilkan oleh suatu gerakan khususnya aktivisme Islam. Agar pembedaan yang dilakukan memiliki argumen yang baik dalam mendapatkan dukungan dan partisipasi oleh semua lapisan.

Kemudian *Framing* yang dilakukan oleh aktivisme Islam sangatlah beraneka ragam, mulai dari LSM Islam, layanan-layanan sosial, partai politik, dan lain-lain, yang pada intinya mengarahkan pada satu tujuan yaitu respon terhadap dua ancaman yang ada di atas dengan dibingkai dengan wacana tentang agama dengan maksud bahwa Islam adalah sebagai jawaban atas pengaruh tersebut.

F. Sintesa Teori

Teori mengenai aktivisme Islam digunakan untuk menganalisis kepentingan politik dan cita-cita politikpersatuan Islam paska reformasi. Kepentingan dan cita-cita politik ini akan mempengaruhi afiliasi politik persatuan Islam dalam memilih partai yang akan didukung di dalam Pemilu paska reformasi. Dan secara tidak langsung juga akan membuka ruang bagi persatuan Islam untuk melanjutkan cita-cita politik yang menginginkan negara berdasarkan syariat Islam paska reformasi.

Teori domestikasi digunakan untuk menggambarkan marginalisasi umat Islam dan politik Islam dalam panggung politik Indonesia. Kemudian dari adanya proses menganalisis ini bisa dijadikan alat untuk menganalisis paska reformasi terbukanya peluang bagi umat Islam terutama persatuan Islam dan politik Islam untuk mewujudkan kembali cita-cita yang sempat tertunda oleh kekuatan rezim Orde Lama dan Orde Baru.

Kemudian teori korporatisme digunakan untuk menganalisis bagaimana persatuan Islam bertahan di bawah tekanan rezim Orde Lama yang sangat otoriter dan memaksa menyingkirkan semua lawan politik dengan menggunakan operasi khususnya di tambah lagi berlakunya azas tunggal yaitu Pancasila. Dan transisi demokrasi digunakan sebagai bahan analisis perpindahan rezim dan terbukanya ruang publik dan arena politik bagi persatuan Islam untuk merespon dan terlibat dalam agenda politik sebagai warga negara dalam menentukan para pemimpinnya. Sedangkan partisipasi bisa memberikan gambaran partisipasi politik Persis paska reformasi.

G. Defenisi Konseptual dan Operasional

1. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan salah satu unsur penelitian yang terpenting dan merupakan defenisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami.¹³ Sehingga defenisi konseptual

¹³Masri Singarimbun Dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta, 1989, hal: 37.

ini membantu dalam penelitian untuk mengamati suatu hal dengan secara abstrak agar tidak mengalami kesalahpahaman.

Adapun defenisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Domestikasi

Merupakan sebuah proses politik yang menyingkirkan kekuatan umat Islam sebagai kelompok mayoritas di Indonesia.

b) Korporatisme

Merupakan sebuah kepentingan yang dibangun atas dasar kekuatan yang bersifat terpusat atau sentralistik oleh penguasa pemerintahan dalam menciptakan stabilitas politik di dalam pemerintahannya.

c) Transisi demokrasi

Merupakan sebuah proses peralihan sistem dalam sebuah negara demi tercapainya stabilitas politik yang sedang terancam akibat dari sistem yang sebelumnya melanggar nilai-nilai dari sistem yang dianutnya.

d) Partisipasi Politik

Merupakan keikutsertaan warga negara dalam mengikuti proses Pemilu dalam menentukan pemimpin di dalam sebuah negara.

e) Aktivisme Islam

Merupakan respon dan tindakan kolektive dari umat Islam untuk membela khususnya masyarakat yang beragama Islam dari ancaman serangan pengaruh dari dunia Barat agar kembali kepada pemahaman agama Islam dengan seutuhnya sebagai jalan untuk menuju keselamatan hidup di atas dunia maupun akhirat.

2. Operasional

Defenisi operasional dalam suatu penelitian bermanfaat untuk mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui afiliasi politik Persis paska reformasi.

Sedangkan afiliasi politik atau indikatornya bisa dilihat dari hubungan atau relasi sebagai berikut:

- 1) Transisi demokrasi
- 2) Partisipasi Politik
- 3) Analisis aktivisme Islam
 - a. Analisis Perseteruan
 - b. Analisis Mobilisasi massa
 - c. Analisis Framing

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Apabila kita merujuk pertanyaan dari rumusan masalah, maka untuk dapat menjawab penelitian dari rumusan masalah ini adalah jenis penelitian yang berdasarkan kualitatif. Menurut Bogdan penelitian kualitatif adalah penelitian yang

akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dipahami.¹⁴ Sementara definisi dari penelitian deskriptif itu sendiri merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data dan membandingkan gejala-gejala yang ditemukan.¹⁵

2. Studi Kasus

Dalam sebuah penelitian apabila pertanyaan yang muncul menggunakan *how* atau *why* sangatlah cocok menggunakan jenis penelitian studi kasus. Karena peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki terletak pada fenomena yang kontemporer dalam masa kini dan dalam konteks kehidupan yang nyata.

Definisi studi kasus menurut Robert K. Yin adalah suatu inkuiri empiris yang menyediakan fenomena di dalam konteks kehidupan hayati, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dan tegas dan multisumber bukti dimanfaatkan.¹⁶

Ada tiga tipe penelitian studi kasus, yaitu: eksplanatoris, eksploratoris dan deskriptif. Pertanyaan penelitian yang menggunakan ‘bagaimana’ pada dasarnya lebih eksplanatoris dan lebih mengarah pada penggunaan strategi-strategi studi kasus. Hal ini disebabkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini berkenaan dengan kaitan-kaitan

¹⁴Dapat ditemukan, Dalam Lexy J. Moleong, 1988, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, hal. 3.

¹⁵Drs. Cholid Narbuka, Drs. Abu Acmad, ”*Metodologi Penelitian*”, Bumi Aksara, hal:44

¹⁶Robert K. Yin , *Studi Kasus: Desain & Metode*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 18.

operasional yang menuntut pelacakan waktu tersendiri, dan bukan sekedar frekuensi atau kemunculan.¹⁷

Studi kasus memiliki desain kasus tunggal dan multi kasus. Desain kasus tunggal terbagi menjadi kasus holistik dan kasus terjal. Penelitian ini menggunakan kasus tunggal terjal karena menggunakan satu unit analisis dan beberapa sub unit analisis. Hal ini dimaksudkan agar desain yang lebih kompleks atau terpancang—bisa berkembang. Sub-unit yang digunakan seringkali dapat menambahkan peluang-peluang signifikansi bagi analisis yang lebih luas, yang mengembangkan bagian-bagian kasus tunggal yang bersangkutan.¹⁸

3. Unit Analisis

Adapun yang dijadikan sebagai unit analisis dalam melakukan penelitian ini adalah organisasi Pimpinan Pusat Persatuan Islam dalam merespon Pemilu paska reformasi.

4. Data dan Sumber Data

Pada dasarnya penelitian skripsi ini menggunakan data yang banyak diperoleh dari buku-buku yang pernah diterbitkan. Tentu untuk memperdalam bahan dari kajian kita membutuhkan data yang lebih *valid*. Seperti menggunakan wawancara kepada tokoh-tokoh yang sekiranya bisa dijadikan sumber dalam penelitian ini.

¹⁷*Ibid, hl.1*

¹⁸*Ibid, hl:47-50*

Metode dari pengumpulan data dari penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder yaitu:

Pertama, data primer: *wawancara* untuk penelitian ini berguna untuk penulis, dimana penulis nanti dapat bertanya kepada kunci responden tentang fakta-fakta dan suatu peristiwa disamping opini mereka mengenai peristiwa tersebut. Kemudian juga memberi responden untuk memberi tanggapannya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun tokoh yang peneliti wawancara adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam yaitu Prof. Abdurrahman dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam yaitu Ustad Tiar Anwar Bachtiar.

Kedua, data sekunder: Dokumen resmi dibagi menjadi dua, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen resmi dari internal di sini sendiri adalah dokumen, seperti: AD/ART (Qanun Asasi dan Qanun Dakhili), struktur organisasi, dan daftar kepengurusan PP Persis. Sedangkan untuk dokumen eksternal yaitu bersal dari majalah, jurnal, artikel, yang memuat mengenai perkembangan Persis dan hubungannya dengan politik.

5. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan pembuatan eksplanasi. Pembuatan eksplanasi bertujuan menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan. Prosedur pembuatan eksplanasi pada dasarnya sangat relevan untuk studi kasus eksplanatoris. Pembuatan eksplanasi dimulai dengan menetapkan serangkaian keterkaitan timbal balik mengenai fenomena

yang diteliti. Pembuatan eksplanasi yang baik harus mencerminkan beberapa proposisi yang signifikan secara teoritis.¹⁹

Dari penjelasan yang ada di atas penulis mencoba mengambil kesimpulan bahwa penelitian berdasarkan prinsip analisis eksplanasi di atas maka penelitian ini mencoba untuk menjelaskan fenomena afiliasi politik Persis paska reformasi dan kemudian dengan meneliti timbal balik hubungan Persis dengan partai politik yang diyakininya bisa mewujudkan cita-cita politik persatuan Islam paska reformasi.

6. Skema Penulisan Skripsi

Secara keseluruhan, skripsi ini mencoba untuk menggambarkan afiliasi politik persatuan Islam paska reformasi. Afiliasi politik Persis pada periode sebelumnya hanya digunakan untuk memberikan gambaran awal untuk memahami apakah persatuan Islam masih memiliki cita-cita politik paska reformasi yang belum tercapai sebelumnya di dua era yaitu Orde Lama dan Orde Baru.

Bab I yang membuat landasan bagi penelitian ini, berisi tentang pentingnya pembahasan mengenai afiliasi politik Persis, teori-teori mengenai aktivisme Islam, domestikasi, korporatisme dan transisi demokrasi dan metodologi penelitian guna mengelaborasi respon politik atau afiliasi politik persatuan Islam.

Bab II merupakan awal pembahasan mengenai persatuan Islam. Dimulai dari pembahasan seputar sejarah berdirinya dan keadaan politiknya saat itu. Termasuk

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002), hal:146

membahas mengenai perjuangan politik Persis saat bersama Masyumi dan bahasan persatuan Islam di bawah tekanan Orde Lama.

Bab III dimulai dengan menjelaskan merajut kembali cita-cita politik persatuan Islam untuk melanjutkan negara yang berdasarkan syariat Islam, kemudian fokus pada bahasan mengenai bagaimana afiliasi politik dan hubungannya persatuan Islam dengan partai politik paska reformasi.

Bab IV berisi dengan analisis mengenai afiliasi politik persatuan Islam dan bagaimana kaitannya atau hubungannya dengan partai politik tertentu.

Bab V merupakan kesimpulan akhir skripsi ini. Bab ini berisi jawaban atas pertanyaan pokok yang telah diajukan pada rumusan masalah dan masukan secara teoritis terhadap teori aktivisme Islam, domestikasi, korporatisme, dan transisi demokrasi dalam konteks afiliasi politik Persis paska reformasi.